

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, Fiqh Siyâsah, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Hal 29
- Abdul Wahab Khallaf, *Al-siyasah al-syari'yya aw nidzham al dawlah al islamiyah* (Al kaherah: Dar Al-Anshar, 1977), 15.
- Abu Daud Sulaiman bin al-, „*Asy''ast*, *Ensiklopedia Kitab 9 Imam: Kitab Sunan Abi Daud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-, „Ashriyah, t.t), hadist nomor 2609
- Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah*, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100
- AI SYAH, Faira; NURDIN, Nurdin; HAQ, Kukuh Prasetyo Idzharul. Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia: Antara Ketidak-Efektifan Sanksi dan Jaminan Hak Asasi Manusia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2022, 10.1: 135-144.
- AL AZIZ, Alfandy Faris; FAUTANU, Idzam; RIZAL, Lutfi Fahrul. Pendidikan Rasa Aman dan Tenteram Masyarakat Perspektif Siyasah Dusturiah: Analisis Tanggung Jawab Kepolisian pada Masyarakat Tasikamalaya Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 2025, 10.2: 238-252.
- Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah (Bayt ats Tsaqifah, cetakan I, 2003)*, hlm 7.
- ANDES, Arie Mathea. *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025. Hal 7
- Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002; hal 33.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- ARIF, Muhammad. Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2021, 13.1: 91-101.
- Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2020). Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Berpendapat. *Padjadjaran Law Review*, 7(2), 26-37.
- Ayuni, N., Umar, F., & Akbal, M. (2021). Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar. *Phinisi Integration Review*, 4(2), 309-316.
- Bambang Sutiyoso, *Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya di Indonesia*,

Jurnal UNISIA Vol. 24, No. 1. 2002, hal 84-94.

Berry, David. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Cet. ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Budiantara, I. N., Dewi, A. A. S. L., & Utama, I. N. (2021). Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 575-581.

Cindy Destiani et al., “Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik,” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (June 28, 2023): 427–41, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>.

Defril Hidayat, Hainadri, Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering), *DATIN LAW JURNAL* Vol. 2, No. 1. 2021, hal 66-75.

DESTIANI, Cindy, et al. Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2023, 2.06: 427-441.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah (rev.ed)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 2-9

Elvi Alfian, Tugas Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Batanghari Legalitas: *Jurnal Hukum*, 12(1), Juni 2020, 27

Eqqv Sudjana dan All Sofyan Hussein. 1998. Hak Asasf Manusia dan Pembangunan. Jakarta: C/DES,Him. 10.

Faredo Yudasena, Prima Angkupi, Intan Pelangi, Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi, *JUSTICE: Jurnal Hukum* Vol 1, No 1, 2021. Hal 38-51

HA Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pranadamedia, 2018), 31

Hadi Utomo, Warsito. Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka, tahun 2005.

Hadisuprpto, Paulus. Juvenile Delinquency. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007. Husin, Budi Rizki. Studi Lembaga Penegak Hukum. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2023.

Hidayat, Defril, dan Hainadri. Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering). *DATIN LAW JURNAL*, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 66-75.

Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Lex Crime* Vol. 1, No. 4. 2012, hal 41-59

- Irwadi, B. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis di Kota Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 560-572.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm 19
- KURNIAWAN, Iwan; NELWITIS, Nelwitis; AFRIZAL, Riki. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh. *Nagari Law Review*, 2023, 7.2: 317-326.
- Lukman Arake, *“Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), 8
- M, H. Nihaya. *Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia*. Sulesana, Volume 10 Nomor 2, 2016.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an* volume 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 198
- Maghfur Ahmad, *Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam *Jurnal “Religia”*, Vol,13 No, 02 Oktober 2010, hlm. 177
- MAHENDRA, Oeny Angga; ISNAENI, Diyan; MUHIBBIN, Moh. Peran Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Antar Pencak Silat Melalui Restorative Justice di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. *JURNAL RECHTENS*, 2025, 14.2: 397-414.
- MAHENDRA, Oeny Angga; ISNAENI, Diyan; MUHIBBIN, Moh. Peran Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Antar Pencak Silat Melalui Restorative Justice di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. *JURNAL RECHTENS*, 2025, 14.2: 397-414.
- Masyur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 42.
- MATIN, Syailendra Hapis; MAHDI, Imam; JALILI, Ismail. Peran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kepahiang dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pelajar Perspektif Fiqh Siyasah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2025, 3.2: 193-212.
- Melda Kamil Ariadno, 2008, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Jakarta: Diadit Media, h. 102.
- MUARMAR, Afif, et al. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 2022, 16.1: 9-9.
- Muhajir, Muhajir. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Pamong Praja Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)*, 2022.

Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Ai' ADI Jurnal Hukum Vol. 13, No. 1. 2021, hal 123

Muhammad bin Isma'îl abu Abdillâh al-Bukhârî al-Ju'fî, *Ensiklopedia Kitab 9 Imam: Kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al Mukhtashar Min Umuri Rasulullâh shallallahu 'alaihi wa sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, (tt.p: Dar Tuq An-Najah, 2001), hadits nomor 6605

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008) h. 10

Nainggolan, Ojak. Pengantar Ilmu Hukum. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2005.

Putu Heri Sukarnita dan I Nyoman Surata, Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1. 2020, hal 38-66.

Ridwansyah, R., Nur, I. T., Lestina, N., Bakara, S. M. M., Sihite, S., & Marolop, S. C. (2024). Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian dalam Kasus Pelindasan Pengendara Ojek Online di Indonesia.

ROPII, Ahmad, et al. *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Etika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menjalankan Tugas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. El-Siyasa: Journal Of Constitutional Law*, 2024, 1: 113-122.

Rozali Abdullah, Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10

Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No.1 2020, hal 359-372.

Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 205-206

Sayyid Quthb, "Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al Qur'an jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 398

Septi Nur Wijayanti, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Jurnal Media Hukum Vol. 23, No. 2. 2016, hal 186-199.

Sigit Saputra, Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Kota Padang, Unes Journal Of Swara Justisia Vol. 3, No. 3. 2019, hal 332-347.

- SITOMPUL, D. P. M. Tugas Polisi dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2003, 10.23: 111-125.
- Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi ; EDISI, Ed. Revisi ; Cet. 48 ; Penerbitan, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017.
- SUCI, Neira Priyanka, et al. Kekerasan Negara Terhadap Rakyat: Tinjauan Ham Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2025, 4.1: 12-24.
- Sutiyoso, Bambang. Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal UNISIA*, Vol. 24, No. 1, 2002, hal. 84-94.
- Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. Ilmu Usul Fiqih. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993),123
TAMPUBOLON, Wahyu Simon. Peran Bhabinkamtibmas Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2020, 8.2: 82-89.
- TAMAM, Muhammad Khavindra. Analisis Yuridis Tentang Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian. In: *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA*. 2024. p. 295-311.
- UNTORO, Agung; CHASANA, Uswatun. UPAYA PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI POLRES SLEMAN. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2023, 3.4: 1145-1158.
- Wahbah zuhaily. "*Ushul Fiqh*". *kuliyat da"wah al Islami*. (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89
- Warsiti Hadi Utomo. H, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005. Hal 12.
- YOSERWAN, Yoserwan, et al. Pemolisian Masyarakat Di Bidang Penegakan Hukum Pidana. *Unes Journal of Swara Justisia*, 2023, 7.1: 74-88.
- YULIANA, Sri. Rekonstruksi perkara sebagai upaya dalam mengungkap kejahatan. *Jurnal Hukum Legalita*, 2022, 4.1: 83-103.
- Zaidan, M. Ali. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.